

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jerman sebagai mitra dagang terbesar Tiongkok di Eropa, memiliki hubungan kerja sama bilateral yang sangat baik dengan Tiongkok di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel. Namun, Jerman di bawah kanselir baru Olaf Scholz memberikan tantangan baru untuk kerja sama Jerman dengan Tiongkok di masa depan. Scholz menekankan bahwa arah kebijakan luar negeri Tiongkok dan ketidakpatuhannya terhadap hukum internasional menimbulkan keraguan tentang hubungan masa depan Jerman dengan Tiongkok. Sebagai tanggapan, Jerman menerbitkan *the New China Strategy* pada Juli 2023, yang bertujuan untuk mendiversifikasi hubungannya dengan Tiongkok sambil mengurangi ketergantungan di sektor-sektor utama. Strategi ini menekankan kompetisi dan persaingan, dengan alasan bahwa otoritarianisme Tiongkok merupakan ancaman bagi Jerman dan peran globalnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri milik Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis dengan tiga parameter yang digunakan dalam menganalisis suatu perubahan kebijakan luar negeri, yakni parameter struktural domestik dan parameter struktural internasional.

Perubahan kebijakan luar negeri Jerman yang dianalisis dengan parameter struktural domestik berjumlah tiga, yakni perbedaan budaya politik pada masa pemerintahan Angela Merkel, pengaruh kelompok bisnis dan sosial-ekonomi di

Jerman, dan sentimen negatif masyarakat Jerman terhadap Tiongkok. Selama masa pemerintahan Merkel, Jerman menerapkan kebijakan pragmatis yang berfokus pada kepentingan ekonomi, sementara pemerintahan baru menekankan perbedaan ideologis dengan Tiongkok. Scholz diusung oleh tiga partai politik yang disebut dengan "Traffic Light Coalition" terdiri dari partai SPD, CDU, dan Partai Hijau. Menteri Luar Negeri Jerman, Anna Baerbock mengusulkan pengurangan kerja sama dengan Tiongkok dengan alasan menghormati hak asasi manusia pada pertemuan para menteri luar negeri G7.

Para pebisnis Jerman juga telah menyuarakan kekhawatiran tentang persaingan tidak sehat dari perusahaan-perusahaan lokal di Tiongkok, karena mereka kehilangan akses ke pemerintah lokal, informasi, dan izin. Perusahaan-perusahaan Jerman dan komunitas bisnis telah mendukung dokumen kebijakan luar negeri *the New China Strategy* untuk mengatasi risiko yang terkait dengan pengaruh ekonomi Tiongkok yang terus meningkat, seperti pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi secara paksa, dan persaingan tidak sehat.

Sentimen negatif masyarakat Jerman terhadap Tiongkok merupakan faktor domestik lainnya yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Jerman. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Palacky di Olomouc menunjukkan bahwa penilaian umum terhadap Tiongkok di Jerman adalah negatif, dengan Tiongkok menerima rata-rata 35,44%, tertinggal jauh dari beberapa sekutu terdekat Jerman di Eropa bahkan negara-negara demokrasi di Asia.

Tiga faktor struktural internasional yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Jerman dan pembentukan *the New China*

Strategy yakni Perubahan Tiongkok di kancah internasional, dan pengaruh Uni Eropa terhadap hubungan bilateral Jerman dengan Tiongkok. Arah kebijakan Tiongkok dianggap telah berubah, memprioritaskan kepentingannya sendiri di atas kepentingan negara lain, yang menyebabkan Jerman mendefinisikan Tiongkok sebagai saingan sistemik. Pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang serta Tiongkok yang juga melanjutkan hubungannya dengan Rusia tentunya berimplikasi langsung bagi keamanan Jerman. Uni Eropa pada awalnya memandang Tiongkok sebagai mitra yang berharga dan sekutu potensial dalam membendung ekspansionisme Soviet. Namun, pelanggaran hak asasi manusia yang kontroversial di Tiongkok telah menyebabkan transparansi dan penindasan yang lebih besar di dalam negeri.

Uni Eropa memainkan peran penting dalam membentuk hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jerman. Jerman sebagai anggota utama Uni Eropa selalu terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan Uni Eropa terhadap Tiongkok, menekankan perlunya hubungan yang seimbang yang menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kepentingan hak asasi manusia dan supremasi hukum Tiongkok. Sebagai mitra dagang yang signifikan dengan Tiongkok, Jerman harus mempertimbangkan kebijakan Uni Eropa ketika menegosiasikan perjanjian dan strategi perdagangannya sendiri. Singkatnya, pengaruh Uni Eropa terhadap hubungan Jerman-Tiongkok menjadi salah satu alasan kuat dibentuknya *the New Tiongkok Strategy* sebagai perubahan kebijakan luar negeri Jerman terhadap Tiongkok.

5.2 Saran

Kebijakan luar negeri *the New China Strategy* ini tergolong masih baru untuk dilihat keefektivasannya, sebab beberapa pengamat menilai bahwa dokumen ini tidak memiliki pengaruh signifikan kepada pihak Tiongkok dilihat dari kurangnya respons pemerintah Tiongkok terhadap dokumen ini. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk peneliti-peneliti selanjutnya agar meninjau lebih lanjut keefektivasan kebijakan luar negeri Jerman atau negara Uni Eropa lainnya terhadap Tiongkok menggunakan kerangka pemikiran yang berbeda agar mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

